

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun peringkat tingkat diversifikasi pangan di 34 provinsi Indonesia pada tahun 2024 guna mendukung ketahanan pangan nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) dengan teknik PROMETHEE. Indikator positif yang digunakan meliputi produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kentang, dan sagu, sedangkan indikator negatif mencakup jumlah penduduk miskin, Indeks Harga Konsumen (IHK) pangan, serta frekuensi bencana alam. Nilai *net flow* (Phi) digunakan untuk menggambarkan posisi relatif setiap provinsi berdasarkan perbandingan antara kekuatan dan kelemahan dari seluruh indikator yang diterapkan.

1. Berdasarkan hasil penelitian, pemeringkatan diversifikasi pangan pada 34 provinsi di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kinerja antarwilayah dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa provinsi dengan nilai Phi positif memiliki tingkat diversifikasi pangan yang lebih baik karena didukung oleh produksi pangan lokal yang lebih beragam dan tekanan sosial, ekonomi, serta lingkungan yang relatif lebih terkendali. Sebaliknya, provinsi dengan nilai Phi negatif menunjukkan bahwa kelemahan pada beberapa indikator masih lebih dominan dibandingkan keunggulan komoditas pangan lokalnya yang menjelaskan bahwa diversifikasi pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi pangan non-beras, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan wilayah dalam menghadapi tekanan kemiskinan, harga pangan, dan risiko bencana.
2. Berdasarkan komoditas pangan non-beras, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan tingkat diversifikasi pangan tertinggi karena memperoleh nilai Phi tertinggi dalam hasil pemeringkatan. Posisi ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki kinerja diversifikasi pangan paling baik dibandingkan provinsi lainnya, terutama karena didukung oleh kontribusi produksi pangan lokal yang relatif kuat dan beragam. Sementara itu, DKI

Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat diversifikasi pangan terendah karena memiliki nilai Phi paling rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh terbatasnya basis produksi pertanian dan tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah lain. Hasil ini menegaskan bahwa diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras, memperkuat kemandirian pangan daerah, dan mendukung ketahanan pangan nasional secara lebih merata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait dalam penguatan diversifikasi pangan nasional.

1. Aspek Teoritis:
 - a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah menjadi 38 provinsi apabila data pada seluruh indikator sudah tersedia secara lengkap dan seragam. Hal ini penting agar hasil pemeringkatan dapat menggambarkan kondisi terbaru seluruh provinsi di Indonesia, termasuk provinsi hasil pemekaran baru.
 - b. Penelitian berikutnya dapat menambahkan indikator lain yang lebih luas, seperti Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi pangan nonberas, akses pasar, infrastruktur distribusi, produktivitas lahan, dan ketersediaan industri pengolahan pangan lokal. Penambahan indikator tersebut dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara diversifikasi pangan dan ketahanan pangan.
 - c. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan pembobotan berbasis *expert adjustment* atau pendapat ahli. Pembobotan equal weight yang digunakan dalam penelitian ini memiliki keunggulan karena sederhana dan objektif, tetapi belum mampu mencerminkan perbedaan tingkat kepentingan antarindikator. Dengan *expert adjustment*, bobot setiap kriteria dapat disesuaikan dengan kondisi empiris, karakteristik wilayah, dan prioritas kebijakan pangan.
 - d. Penelitian mendatang juga dapat membandingkan metode PROMETHEE dengan metode MCDM lainnya, seperti TOPSIS, AHP, ELECTRE, atau

VIKOR, untuk melihat konsistensi hasil pemeringkatan serta memperkuat validitas model dalam analisis diversifikasi pangan.

2. Aspek Praktis:

- a. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat produksi pangan lokal sesuai potensi masing-masing wilayah, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kentang, dan sagu. Penguatan komoditas lokal penting untuk memperluas pilihan sumber pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai pangan pokok utama.
- b. Pengembangan diversifikasi pangan perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Komoditas pangan lokal perlu dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah agar memiliki daya simpan lebih panjang, lebih mudah diterima masyarakat, dan mampu meningkatkan pendapatan petani maupun pelaku UMKM.
- c. Wilayah dengan kategori sedang perlu diarahkan pada penguatan inovasi pangan lokal dan pemerataan pengembangan komoditas nonberas. Hal ini diperlukan karena wilayah tersebut telah memiliki potensi pangan lokal, tetapi belum cukup kuat untuk menghasilkan tingkat diversifikasi pangan yang tinggi.
- d. Wilayah dengan kategori rendah memerlukan perhatian lebih dalam penguatan produksi dan pemanfaatan pangan lokal. Pada wilayah dengan basis pertanian terbatas, strategi dapat diarahkan pada penguatan distribusi pangan, pengembangan pangan olahan, kerja sama antardaerah, dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
- e. Pemerintah juga perlu memperhatikan indikator penghambat seperti jumlah penduduk miskin, IHK makanan, dan bencana alam. Tingginya kemiskinan dapat membatasi akses masyarakat terhadap pangan, kenaikan harga makanan dapat menurunkan keterjangkauan pangan, sedangkan bencana alam dapat mengganggu produksi dan distribusi. Oleh karena itu, kebijakan diversifikasi pangan perlu didukung oleh pengentasan kemiskinan, stabilisasi harga pangan, serta mitigasi risiko bencana.